
	<p>Journal Nagalalang Primary Education 6 (1) (2024): 07 ISSN: 2715-7180</p>	
---	--	---

Pengaruh Politik Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Terutama dalam Pendidikan Dasar

Mario Florentino

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Nusa Nipa

Email: marioflorentino.0211@gmail.com

Abstrak

Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat diketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Pendidikan selalu sepihak. Pendidikan yang diberikan oleh pendidik selalu berdasarkan keinginan pola penguasa yang menetapkan kurikulum dan karenanya, politik sangat berkaitan erat dengan pendidikan. Politik adalah kebijakan, siapa yang menguasai politik atau siapa yang menjadi pemimpin dialah yang kemudian menentukan arah pendidikan. Ketika sebuah rezim berkuasa, selalu berusaha mencitrakan diri sebagai pekerja keras yang serius demi mendapat nilai plus dari rakyatnya dengan harapan akan terpilih kembali pada periode berikutnya. Itu sebuah kewajaran dari perjuangan politik. Pendidikan dalam konteks ini adalah pendidikan dasar dapat dijadikan nilai plus yang dapat diterima secara masif di seluruh pelosok negeri, langsung menyentuh hajat hidup orang banyak dan hasilnya bisa dilihat di kemudian hari. Dengan kata lain, tidak sekedar memberi tampilan luar yang baik tetapi dunia pendidikan adalah investasi besar untuk jangka panjang dan menengah.

Kata kunci: Politik, Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, Pendidikan Dasar

Pendahuluan

Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat diketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Hal ini diperkuat dengan penelitian dari Borah (2012) bahwa Pemerintah India membuat begitu banyak kebijakan dan amandemen untuk meningkatkan standar pendidikan. Pemerintah begitu ketat dalam menerapkan kebijakan dan amandemen baru. Sementara penelitian dari Wales, dkk (2016) menyatakan bahwa penerapan analisis penyelesaian politik dapat membantu menjelaskan pola kemajuan dalam akses dan kualitas pendidikan, dan untuk mengidentifikasi insentif politik yang mendasarinya. Tidak berlebihan kiranya bahwa pendidikan sebagai salah satu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara.

Pendidikan selalu sepihak, pendidikan yang diberikan oleh pendidik selalu berdasarkan keinginan pola penguasa yang menetapkan kurikulum. Dan karenanya politik ternyata sangat berkaitan erat dengan pendidikan. Politik adalah kebijakan, siapa yang menguasai politik atau siapa yang menjadi pemimpin dialah yang kemudian menentukan arah pendidikan. Ketika sebuah rezim berkuasa selalu berusaha mencitrakan ataupun kerja keras yang serius untuk mempunyai nilai plus bagi rakyatnya. Dengan harapan akan terpilih kembali pada periode berikutnya. Itu sebuah kewajaran dari perjuangan politik. Pendidikan dalam konteks ini dapat dijadikan nilai plus yang dapat diterima secara massif di seluruh pelosok negeri, langsung menyentuh hajat hidup orang banyak dan hasilnya bisa dilihat di kemudian hari, atau dengan kata lain, tidak sekedar memberi tampilan yang baik tetapi dunia pendidikan adalah investasi besar untuk jangka panjang dan menengah. Nir dan Kafle (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa stabilitas politik memainkan peran utama dalam menjelaskan tingkat kelangsungan hidup dalam pendidikan ketika digunakan sebagai prediktor tunggal atau ketika diperkenalkan dalam analisis dengan PDB per kapita. Setelah temuan yang dilaporkan sebelumnya menunjukkan hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas rezim.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data atau studi literatur. Menganalisis secara mendalam temuan-temuan yang tidak dapat di kuantifikasikan. Subyek pengaruh politik dalam sistem pendidikan nasional Indonesia terutama dalam pendidikan dasar. Hasil dari bermacam-macam jurnal yang akan dilakukan telaah literatur guna untuk menjawab hasil dan pembahasan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perubahan Kekuasaan Berdampak Pada Perubahan Kurikulum di Indonesia

Berdasarkan kronologis historis kurikulum pendidikan nasional telah terjadi perubahan kurikulum dari tahun 1947 hingga tahun 2013. Perubahan kurikulum terjadi seiring dengan terjadinya perubahan pada kondisi perpolitikan di Indonesia. Sebagaimana diketahui kurikulum tahun 1947 yang berlaku pada masa kemerdekaan dan dikenal sebagai leer plan, kurikulum disusun untuk kepentingan pemerintahan pada saat itu yaitu kolonialisme Belanda. Kurikulum tersebut bertahan hingga tahun 1952. Kurikulum tahun 1952 merupakan bentuk penyempurnaan dari kurikulum 1947 yang diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai. Perubahan ataupun penyempurnaan tersebut juga masih untuk kepentingan pemerintah saat itu yaitu pemerintahan Republik Indonesia yang baru. Penyempurnaan kurikulum 1952 ini sudah memiliki arah untuk sistem pendidikan nasional dimana isi pelajaran dikaitkan dengan

kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa politik memiliki hubungan dengan kurikulum.

Usai tahun 1964 kembali pemerintah menyempurnakan kurikulum di Indonesia. Pada tahun 1968 pemerintah kembali melakukan pembaruan dengan perubahan kurikulum struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi Pembinaan Jiwa Pancasila, Pengetahuan Dasar, dan Kecakapan Khusus. Pada tahun 1968 hingga kurikulum 1975 perubahan kurikulum lebih kepada penyesuaian materi-materi pelajaran dan tujuan pengajaran agar pendidikan menjadi lebih efisien dan efektif. Barulah pada tahun 1984 muncul kurikulum yang disusun dengan pendekatan kemampuan. Hingga pada akhir masa kepemimpinan pemerintahan tahun 1998 kurikulum tidak mengalami banyak perubahan yaitu pada masa kepemimpinan orde baru presiden Soeharto.

Tahun 2004 pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) diberlakukanlah kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum pada masa kepemimpinan SBY, pendidikan lebih menitikberatkan pada kompetensi guru dan siswa. Selama masa kepemimpinan SBY, perubahan kurikulum terjadi sebanyak tiga kali. Hingga akhirnya pada tahun 2013 ditetapkan pemerintah Kurikulum 2013 (Kurtilas). Pada pelaksanaan kurikulum ini pemerintah juga melakukan kebijakan-kebijakan dengan melakukan perampingan materi pelajaran dan pada tanggal 4 Desember 2014 Kurikulum 2013 diberhentikan dan dikembalikan ke KTSP 2006.

Pada Tahun 2019, pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang kedua, memperkenalkan tagline baru dalam dunia pendidikan yaitu “Merdeka Belajar” dengan kurikulum baru yaitu Kurikulum Merdeka. Diprakarsai oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Dikatakan merdeka dalam belajar artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi.

Dampak Terhadap Pendidikan Dasar di Indonesia

Sebagaimana kronologis perubahan-perubahan kurikulum tersebut, ternyata terjadi saat ada perubahan kondisi perpolitikan di Indonesia. Perubahan politik ternyata diikuti dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional terutama dalam pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh politik dalam pendidikan dasar yang teridentifikasi dengan adanya perubahan kurikulum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Maryanto, dkk. (2017), bahwa politik mempengaruhi revitalisasi kurikulum. Hasil yang merupakan model revitalisasi kurikulum harus dilaksanakan pemantauan dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian dan hasil yang diharapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi akan berfungsi sebagai rekomendasi untuk mengembangkan dan atau meningkatkan kurikulum yang akan datang. Hal ini juga diperkuat oleh Nkyabonaki (2013) yang menyatakan bahwa efisiensi dan

penyampaian pendidikan yang efektif di bawah sistem pendidikan yang terdesentralisasi dan diliberalisasi sebagaimana diatur dalam dokumen kebijakan Pendidikan dan Pelatihan memerlukan pemantauan yang lebih ketat terhadap sekolah serta mekanisme umpan balik yang memadai antara pengawas sekolah dan lembaga pendidikan, manajer dan administrator di zona, daerah dan tingkat distrik.

Politik dalam pendidikan dasar di Indonesia juga berpengaruh pada anggaran pendidikan. Pendanaan Pendidikan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD dengan kenyataan dan praktik pendanaan pendidikan. Kenyataannya bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan sebesar 20% APBN/APBD tersebut didalamnya sudah termasuk gaji guru dan lain-lain. Ketidakkonsistenan dalam pendanaan pendidikan menyebabkan sarana pendukung pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan olahraga, dan alat prasarana lainnya menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Sukasni dan Efendy (2017) bahwa adanya fakta-fakta yang menunjukkan ada yang tidak beres dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Kesalahan tersebut salah satunya dapat dilihat dari politik anggaran.

Politik juga berpengaruh terhadap sumber daya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan. Salah satu hal penting dalam pengembangan proses pembelajaran yang bermakna adalah tersedianya guru-guru SD yang profesional. Dari 1,4 juta guru SD di Indonesia, kualifikasi pendidikannya masih rendah, yaitu 65% pendidikan guru masih dibawah 4 tahun. Penyediaan guru yang profesional selama ini terabaikan. Jika jabatan profesionalitas guru SD disejajarkan dengan jabatan profesional lainnya seperti dokter dan pengacara, maka profesionalitas guru masih tertinggal. Dalam UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menuntut guru sebagai pendidikan bertaraf A1 dan D4+. Salah satu kekurangan dalam pendidikan guru sebelum menjabat sebagai guru yaitu praktek profesional. Pada tahap ini selama 2 semester para mahasiswa belajar menerapkan berbagai pengetahuan dasar akademik profesional. Para mahasiswa 2/3 waktunya berada dalam lingkungan sekolah untuk mengamati, memimpin, dan membimbing proses pembelajaran dibawah supervisi tim dosen profesional. Kebijakan sertifikasi guru, awalnya sebagai upaya untuk menjadikan guru yang ada menjadi guru yang profesional. Namun beberapa indikasi menunjukkan kebijakan sertifikasi guru gagal membuat guru menjadi profesional. Karena guru yang mengejar sertifikasi hanya semata-mata bermotif mengejar tunjangan sertifikasi, setelah mereka mendapatkan sertifikat, tidak ada tanda-tanda mereka berubah menjadi guru profesional, baik dalam merancang, mengembangkan, melaksanakan, menilai, dan mendiagnosa berbagai masalah yang dihadapi peserta didik terlihat tidak bedanya antara guru yang bersertifikat dengan yang belum bersertifikat. Kenyataannya sejalan

dengan temuan penelitian dari Sukasni dan Efendy (2017) bahwa salah satu ketidakberesan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Indonesia adalah adanya politik organisasi pendidikan dalam mempersiapkan guru profesional.

Simpulan

Politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Pendidikan selalu sepihak dalam artian pendidikan yang diberikan oleh pendidik selalu berdasarkan keinginan pola penguasa yang menetapkan kurikulum dan karenanya, politik sangat berkaitan erat dengan pendidikan. Politik adalah kebijakan, siapa yang menguasai politik atau siapa yang menjadi pemimpin dialah yang kemudian menentukan arah pendidikan. Ketika sebuah rezim berkuasa, selalu berusaha mencitrakan diri sebagai pekerja keras yang serius demi mendapat nilai plus dari rakyatnya dengan harapan akan terpilih kembali pada periode berikutnya. Itu sebuah kewajaran dari perjuangan politik. Pendidikan dalam konteks ini adalah pendidikan dasar dapat dijadikan nilai plus yang dapat diterima secara masif di seluruh pelosok negeri, langsung menyentuh hajat hidup orang banyak dan hasilnya bisa dilihat di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2022. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VWtKTmFFbDZaSFJWWVhOYU16WmhaRzICYIM5Wlp6MDkjMw==/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-dasar--sd--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-menurut-provinsi--2022.html?year=2022>. Tanggal akses 16 Mei 2024.
- Borah, R.R. 2012. Impact of Politics and Concerns with the Indian Education System. *International Journal of Educational Planning & Administration*, 2 (2), 91-96. https://www.ripublication.com/ijepa/ijepav2n2_06.pdf
- Ijaduola, K.O., Odunaike, K.O., Ajayi, V.B. 2012. The Interplay between Politics and Education in Nigeria: Any Symbiotic Relationship?. *Journal of Education and Practice*, 3 (9), 124-129. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/download/2295/2298>
- Maryanto, Khoiriyah, N., Saputro, S.P. 2017. The Law Politics in Indonesia's Pancasila and Citizenship Education Curriculum Revitalization of 2013. *Journal Asian Social Science*, 13 (9), 167-173.
- Miles, B.M & Huberman, A.M. 2008. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.